

## **KEBIJAKAN FISKAL DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI**

### ***FISCAL POLICY AND THE IMPACT ON INDONESIANS ECONOMIC GROWTH DURING THE PANDEMIC***

**Mohammad Rizal Ma'ruf<sup>1</sup>, Eka Hendi Andriansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya  
email: mohammad.18023@mhs.unesa.ac.id email: ekaandriansyah@unesa.ac.id

#### **ABSTRAK**

Pandemi telah mengubah pola hidup masyarakat, mulai diberlakukannya *social distancing*, pekerja yang melakukan *work from home* (wfh), para pelajar yang *study from home* (sfh), bahkan sampai ditutupnya beberapa pabrik atau perusahaan yang berakibat adanya PHK besar-besaran kepada para buruh. Merujuk dari dampak kebijakan sosial yang telah diterapkan, selanjutnya pemerintah memberlakukan kebijakan perekonomian pada bidang fiskal untuk mempertahankan perokonomian. Kebijakan fiskal dinilai tepat dilaksanakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 karena pemerintah bisa mengatur keseimbangan pengeluaran dan penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pada masa pandemi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder alokasi APBD tiap Provinsi di Indonesia tahun 2020 yang bersumber dari BPS Nasional dan BPS tiap provinsi. Uji regresi linier berganda digunakan dalam melakukan analisis data. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil menunjukkan Pendapatan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pengeluaran barang dan jasa yang berpengaruh negatif signifikan. Kemudian pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan. Dalam hasil uji parsial diperoleh pendapatan pajak, pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di Masa pandemi.

**Kata Kunci : Kebijakan Fiskal; Petumbuhan Ekonomi; Pendapatan Pajak; Pengeluaran Barang & Jasa; Pengeluaran Modal**

#### **ABSTRACT**

*The pandemic has changed people's lifestyles, starting from the implementation of social distancing, physical distancing, workers who work from home (wfh), students who study from home (sfh), and even to the closure of several factories or companies which result in massive layoffs to workers. Referring to the impact of social policies that have been implemented, the government then imposes economic policies in the fiscal sector to maintain smoking. Fiscal policy is considered appropriate to be implemented in the face of the Covid-19 pandemic because the government can regulate the balance of expenditure and revenue. This study aims to find out the fiscal policies implemented by government during the pandemic, as well as how they affect economic growth. This research is a descriptive research with a quantitative approach. The data used is secondary data on the allocation of regional budgets for each province in Indonesia in 2020 sourced from national bps and bps of each province. Multiple linear regression is used in conducting data analysis. The sampling technique used is purposive sampling. The results show tax revenue has a significant effect on economic growth. In contrast to the expenditure of goods and services that have a significant negative effect. Then capital expenditures have no significant effect. In the results of the partial test, tax revenues, goods and services expenditures, and capital expenditures jointly affected Indonesia's economic growth during the pandemic.*

**Keywords: Fiscal Policy; Economic Growth; Tax Revenues; Goods & Services Expenditures; Capital Expenditures**

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang menjadi perhatian pemerintah untuk menganalisis kondisi pembangunan nasional yang tengah terjadi di daerah tersebut. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa di suatu daerah pada periode tertentu ditinjau dari segala aktivitas perekonomian yang dilakukan (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Pembangunan suatu daerah bisa diukur keberhasilannya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui perubahan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yang terjadi di daerah bersangkutan (Romhadhoni et al., 2019). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah digambarkan dengan tingginya tingkat PDRB mampu menjadi indikator tingkat keberhasilan pembangunan serta kondisi perekonomian yang kuat di daerah tersebut dan sebaliknya (Prayitno & Yustie, 2020).

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal sebagai alat bantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah alat yang sangat penting perannya dalam mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas harga, memperluas basis ekonomi di berbagai sektor, serta memperluas lapangan pekerjaan yang secara khusus mampu menurunkan tingkat pengangguran (Bahari & SBM, 2019). Kebijakan fiskal merupakan elemen kunci dari kebijakan ekonomi negara-negara berkembang. Kebijakan ini adalah kendaraan untuk mempengaruhi stabilitas makroekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Chugunov et al., 2021). Bahkan, kebijakan fiskal sering digunakan untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan kualitas hidup penduduk. Pengambilan kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong perekonomian lebih cepat di saat kondisi ekonomi melemah ditandai dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi (Kouassi, 2018). Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi didorong oleh banyak faktor seperti kesediaan lapangan kerja dalam perekonomian, transparansi pemerintah, komposisi belanja pemerintah, atau bahkan ukuran dan kondisi pemerintahan (Phuc Canh, 2018).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 mengatur tentang wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal serta mengatur segala urusannya sendiri atau dikenal otonomi daerah (Nugraha, 2019). Desentralisasi fiskal merupakan sarana dalam mendorong efisiensi penyediaan barang publik serta dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara layanan publik dengan kebutuhan lokal (Hanif et al., 2020). Perlu diingat bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan potensi daerah, keterlibatan pihak eksternal (investor, pengusaha, dan masyarakat), kualitas sumber daya manusia, dan manajemen pengelolaan perekonomian daerah menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang dijalankan (Christiari, 2021). Perbedaan kemampuan pengelolaan keuangan dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal di tiap daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu mengalokasikan dana yang diperoleh dari APBN dalam mendanai kebutuhannya sendiri sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut. Manajerial keuangan tersebut juga menjadi pemicu meningkatnya kemandirian ekonomi dan daya saing daerah sehingga mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat (Wiraswasta et al., 2019)

Kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termaktub dalam struktur APBD daerah tersebut. Secara umum struktur APBD terdiri atas pembiayaan daerah, pendapatan daerah, serta belanja daerah. Pada pendapatan daerah didalamnya memuat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pendapatan sah lainnya. Sedangkan belanja daerah didalamnya memuat belanja langsung dan tidak langsung. Sedangkan pembiayaan daerah memuat pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan (Amri, 2020). Kebijakan fiskal yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi menjadi beberapa variabel. Dalam sisi pendapatan variabel yang digunakan adalah penerimaan pajak daerah. Sedangkan dalam sisi belanja atau pengeluaran dibatasi pada pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal. Sehingga dari penjabaran tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut; Hipotesis pertama terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan pajak terhadap PDRB ADHK, Hipotesis kedua ada pengaruh signifikan antara pengeluaran barang dan jasa terhadap PDRB ADHK, hipotesis ketiga terdapat pengaruh signifikan antara pengeluaran modal terhadap PDRB ADHK, dan hipotesis keempat terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pendapatan pajak, pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal terhadap PDRB ADHK.

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai hubungan Kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi temuan yang sudah ada masih

menghasilkan kesimpulan yang bervariasi. Misalnya kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran pemerintah melalui belanja modal, penelitian yang dilakukan oleh (Maisaroh & Risyanto, 2018; Waweru, 2021) menemukan bahwa investasi atau belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya pada belanja barang dan jasa melalui penelitian (Pusporini, 2020) menemukan bahwa belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian dari sisi penerimaan, melalui penelitian (Evans et al., 2018) menemukan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Lebih lanjut dalam penelitian (Bâzgan, 2018) menemukan hasil bahwa penerimaan pajak tidak langsung dalam jangka waktu menengah mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Sementara penerimaan pajak langsung mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Berbagai situasi global telah dihadapi oleh pemerintah, sehingga diperlukan analisis mendalam dalam menerapkan strategi kebijakan perekonomian tak terkecuali di masa pandemi Covid-19. Pandemi telah mengubah pola hidup masyarakat, mulai diberlakukannya *social distancing*, *physical distancing*, pekerja yang melakukan *work from home* (wfh), para pelajar yang *study from home* (sfh), bahkan sampai ditutupnya beberapa pabrik atau perusahaan yang berakibat adanya PHK besar-besaran kepada para buruh. (Yamali & Putri, 2020). Akibat diterapkannya kebijakan sosial ini, perekonomian berjalan lambat. Aktivitas masyarakat dibatasi sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi barang. Menurunnya minat investor dalam melakukan investasi juga memberikan dampak terhadap perekonomian ditandai dengan menurunnya kurva pasar ke arah negatif. Melambatnya perekonomian bukan hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi sektor besar saja, namun pelaku ekonomi sektor kecil dan menengah juga merasakan dampaknya (Jufra, 2020). Merujuk dari dampak kebijakan sosial yang telah diterapkan, selanjutnya pemerintah memberlakukan kebijakan perekonomian pada bidang fiskal untuk mempertahankan perekonomian. Kebijakan fiskal dinilai tepat dilaksanakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 karena pemerintah bisa mengatur keseimbangan pengeluaran dan penerimaan (Junfeng et al., 2022). Pendapatan lainnya dan belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat khususnya saat terjadi pandemi covid-19, karena pemerintah daerah tersebut belum mampu merealisasikan dana sesuai dengan tujuan alokasi dana yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Berbeda dengan belanja tidak langsung yang memberikan pengaruh signifikan karena merupakan faktor yang memengaruhi serta memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (Azimi, 2021). Kemudian pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Afrika Selatan. Hasil tersebut didasari dengan kekayaan bahan tambang seperti emas, platinum dan berlian, sehingga pembentukan modal yang baik oleh pemerintah dapat berdampak langsung kepada pendapatan pajak, mengurangi defisit anggaran, mengurangi utang dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pengeluaran pemerintah dan utang pemerintah yang berpengaruh negatif dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi negara Afrika Selatan (Makhoba et al., 2019). Kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan Turki. Belanja pemerintah di lima negara tersebut sangat penting untuk dijalankan dalam upaya mempertahankan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 melalui *refocusing* dan realokasi anggaran dana pemerintah (Junfeng et al., 2022).

Fokus penelitian terdahulu menggunakan objek kajian yang masih bersifat umum seperti pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah, sehingga dirasa perlu meneliti lebih lanjut dengan mengerucutkan pembahasan terkait pengaruh kebijakan fiskal yang digambarkan melalui penerimaan pajak, pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal terhadap pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB ADHK. Kemudian wilayah obyek penelitian terdahulu adalah negara maju, kemudian negara berkembang di Afrika, maka dipilihlah Negara Indonesia sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya. Melalui berbagai stimulus yang telah diberikan dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka selayaknya mengetahui kebijakan fiskal yang diterapkan serta bagaimana pengaruh kebijakan fiskal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang (Silalahi & Ginting, 2020). Kebijakan fiskal sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga dapat mempertahankan perekonomian wilayahnya yang meliputi produksi, investasi, konsumsi, kestabilan harga serta kesempatan kerja. Artinya keuangan suatu wilayah bukan hanya mengenai pembiayaan tugas rutin pemerintah saja, namun juga sebagai alat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan (Juliani, 2020). Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen dalam pelaksanaannya yakni pos pendapatan dan pos pengeluaran. Pos pendapatan terdiri dari penerimaan pajak, pinjaman dalam dan luar negeri, serta pinjaman bank sentral. Sedangkan pos pengeluaran dapat berupa belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, serta transfer payment (Bahari & SBM, 2019).

Selanjutnya (Mirani et al., 2021) mengelompokkan kebijakan fiskal berdasarkan banyaknya pendapatan dan pengeluaran. Diantaranya, kebijakan fiskal dinamis, kebijakan fiskal seimbang (*balanced budget*), kontraktif, dan ekspansif. Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang bermaksud untuk mengadakan pendapatan seiring bertambahnya waktu sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal seimbang (*balanced budget*) yakni kebijakan yang diatur dengan tujuan menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Dampak dari kebijakan ini adalah negara tidak perlu melakukan utang. Namun saat kondisi ekonomi dengan tidak baik, maka perekonomian negara akan menjadi lebih buruk. Kemudian kebijakan kontraktif merupakan kebijakan yang mengatur jumlah pendapatan agar lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini bisa digunakan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami inflasi. Selanjutnya adalah kebijakan ekspansif yang merupakan kebalikan dari kebijakan kontraktif. Artinya kebijakan ini mengatur agar pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kebijakan ini menjadi salah satu

cara yang dilakukan saat kondisi ekonomi mengalami depresi.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) suatu wilayah pada tahun tertentu yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita setiap orang dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. Dalam tinjauan lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses mengubah kondisi ekonomi suatu wilayah menuju kondisi yang lebih baik untuk periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di wilayah ekonomi dalam interval waktu tertentu (Magdalena & Suhatman, 2020).

Dari sudut pandang berbagai teori mengenai pertumbuhan seperti teori Sollogg, Neoklasikisme, Harold Domar, serta teori Subjektivitas Romer, terdapat faktor tambahan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : 1) Akumulasi harta kekayaan, termasuk juga penanaman modal baru baik berupa real estate, pabrik, tanah, maupun sumber daya manusia. 2) Pertumbuhan penduduk serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang akan terjadi beberapa tahun mendatang. 3) Kemajuan teknologi (Hasanudin et al., 2021).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian data yang telah diperoleh akan diinterpretasi dan dianalisis (Panama et al., 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah data statistik ekonomi tahunan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* yang menentukan sampel dengan beberapa kriteria (Kurniawan, 2018, p. 290) ; 1) data alokasi APBD seluruh Provinsi di Indonesia yang dapat diakses pada situs

BPS Nasional maupun tiap BPS tiap Provinsi tahun 2020 2) Realisasi Pendapatan Pemerintah tiap Provinsi menurut jenis pendapatan tahun 2020, 3) Realisasi Belanja pemerintah tiap Provinsi menurut jenis belanja tahun 2020, 4) nominal PDRB ADHK tiap Provinsi tahun 2020.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Kebijakan Fiskal yang berupa: pendapatan pajak (X1); pengeluaran barang dan jasa (X2); & pengeluaran modal (X3). Sedangkan Variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB ADHK (Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan). Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai, dilakukan dengan cara menghitung, mencatat, dan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari BPS Nasional dan BPS tiap Provinsi. Jenis data yang diambil adalah data *cross section* yang diambil pada satu waktu tertentu yakni tahun 2020. Beberapa uji data yang akan dilakukan adalah; uji asumsi klasik, uji regresi linier, dengan menggunakan *software* SPSS Versi 24 dalam melakukan analisis data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Normalitas

Hasil output pada uji normalitas menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,052 sehingga nilainya lebih besar daripada 0,05 yang

bisa diartikan bahwa data residual telah terdistribusi normal

#### Uji Heteroskedastisitas

Hasil output pada SPSS diperoleh nilai signifikansi variabel pendapatan pajak = 0,597, pengeluaran barang & jasa = 0,705, pengeluaran modal = 0,203. Dengan menggunakan Uji *Glejser* kesemua nilainya lebih besar daripada 0,05 yang berarti residual data bebas dari heteroskedastisitas

#### Uji Autokorelasi

Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,818. Dengan jumlah  $N=34$  serta  $k=3$ . Maka diperoleh nilai  $du = 1,2707$  dan nilai  $df=1,6519$ . Dengan menggunakan rumus  $du < d < 4-df$  maka diperoleh  $1,2707 < 1,818 < 2,3481$  yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada data ini.

#### Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dilihat pada nilai VIF diperoleh nilai 8,160 untuk variabel pendapatan pajak, 9,377 untuk variabel pengeluaran barang dan jasa, 3,089 untuk pengeluaran modal. Semua nilainya lebih kecil dari 10 maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

#### Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Unstandardized Coefficients    Standardized coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized coefficients		
		B	Std. error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	39167.631	555651.969		.704	.487
	PP	96.005	10.597	1.332	9.060	.000
	PBJ	-81.327	24.691	-.519	-3,294	.003
	PM	98.188	71.728	.124	1.369	.181

Dependent Variable: PDRB ADHK

Sumber : olah data penulis menggunakan SPSS 24, 2022

Mengacu pada hasil output pada tabel 1, maka diformulasikan persamaan sebagai berikut;

$$\text{PDRB ADHK} = 39167,631 + 96,005 \text{ PJ} - 81,327 \text{ PBJ} + 98,188 \text{ PM} + e$$

Berdasarkan rumus persamaan diatas dapat diambil interpretasi sebagai berikut; Nilai konstanta sebesar 39167,631. Yang berarti apabila variabel independen (Pendapatan pajak, Pengeluaran barang & jasa, pengeluaran modal) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka nilai PDRB ADHK sebesar 39167,631 satuan.

Kemudian nilai koefisien pendapatan pajak sebesar 96,005. Yang berarti apabila variabel pendapatan pajak mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka PDRB ADHK meningkat sebesar 96,005 satuan dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan. Selanjutnya nilai koefisien pengeluaran barang & jasa sebesar -81,327. Yang berarti apabila pengeluaran barang & jasa mengalami peningkatan 1 persen, maka PDRB ADHK menurun sebesar 81,327 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Lalu nilai koefisien pengeluaran modal sebesar 98,188. Yang berarti

apabila variabel pengeluaran modal mengalami peningkatan 1 persen, maka PDRB ADHK meningkat sebesar 98,188 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan

### Uji Parsial/Uji t

Berdasarkan output SPSS pada tabel 1 didapatkan nilai signifikansi variabel pendapatan pajak = 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti pendapatan pajak signifikan berpengaruh

### Uji F

terhadap PDRB ADHK. Kemudian nilai signifikansi pengeluaran barang dan jasa = 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga pengeluaran barang & jasa signifikan berpengaruh terhadap PDRB ADHK. Dan yang terakhir nilai signifikansi pengeluaran modal = 0,181 lebih besar dari 0,05. Sehingga pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK

**Tabel 2**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.319E+12	3	2.106E+12	115.744	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5.460E+11	30	1.820E+10		
	Total	6.865E+12	33			

a. Dependent Variable: PDRB ADHK

b. Predictors: (Constant), PP, PBJ, PM

Sumber : olah data penulis menggunakan SPSS 24, 2022

Output dari SPSS pada tabel 2 didapatkan nilai probabilitas F hitung sebesar 115,744. Kemudian diperoleh f tabel sebesar 2,92 untuk n=34 dan k=4. Sehingga f hitung lebih besar daripada f tabel ( $115,744 > 2,92$ ) yang artinya ada pengaruh simultan antara seluruh variabel

### Uji Determinasi R

independen (pendapatan pajak, pengeluaran barang & jasa, pengeluaran modal) terhadap variabel dependen (PDRB ADHK)

**Tabel 3**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Squared	Adjusted R Squared	Std. Error of Estimate	R Square Change
1	.959 <sup>a</sup>	.920	.913	134904.3929	.920

a. Predictors: (Constant), PP, PBJ, PM

b. Dependent Variable: PDRB ADHK

Sumber : olah data penulis menggunakan SPSS 24, 2022

Berdasarkan output SPSS pada tabel 3 dalam menguji Koefisien Determinasi didapatkan Nilai Adjusted R Squared = 0,913 yang berarti variabel PDRB ADHK mampu dijelaskan oleh variabel pendapatan pajak, pengeluaran barang & jasa, serta pengeluaran modal sebesar 91,3 persen dan sisanya adalah dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan

### Pembahasan

#### Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi

Dalam menghadapi pandemi covid-19 pemerintah melakukan rekayasa fiskal baik dari pos penerimaan maupun pengeluaran. Pada pos penerimaan khususnya perpajakan, Pemerintah melalui kementerian keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan nomor 23 tahun 2020 tentang stimulus pajak bagi seluruh wajib

pajak (Azimi, 2021). Kebijakan tentang pajak yang diambil tersebut antara lain; 1) penurunan tarif PPH badan secara bertahap, 2) insentif perpajakan di pasar modal bagi kepemilikan publik, 3) perpanjangan proses administrasi perpajakan, 4) pemberlakuan pajak pada transaksi elektronik (Fahrika & Roy, 2020). Pemberian insentif pajak dilakukan demi terjaganya pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor tertentu, serta daya beli masyarakat sebagai tindakan nyata menanggulangi wabah Covid-19 (Mirani et al., 2021). Pendapatan pajak pada masa pandemi bukan lagi berfungsi sebagai penerimaan pemerintah saja, melainkan digunakan sebagai pengatur kegiatan dan produktivitas sektor tertentu (Tambunan, 2020).

Diberlakukannya kebijakan *work from home* pada masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah menyebabkan sebagian besar rencana

pengeluaran barang & jasa seperti kebutuhan kantor, kegiatan perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya menurun karena keseluruhan kegiatan dialihkan menjadi berbasis online. Kebijakan wfh ini diambil demi menekan angka positif covid-19 serta tetap menjaga kesehatan dan keamanan bersama (Onibala et al., 2021). Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah melakukan *refocusing* anggaran dana baik itu menunda maupun meniadakan kegiatan yang tidak relevan dengan kondisi pandemi. Pada pos pengeluaran modal, pembiayaan proyek yang masih bisa dinegosiasi untuk ditunda dapat menghemat pembiayaan modal pemerintah sehingga defisit anggaran bisa ditekan. Alokasi yang telah dibuat kemudian dialihkan kepada sektor yang dinilai sangat penting seperti; pembelian alat kesehatan, insentif tenaga medis, pendanaan kartu prakerja, maupun pemberian bebas tarif untuk penggunaan listrik (Feranika & Haryati, 2020)

### **Pendapatan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi**

Mengacu pada hasil uji parsial diatas bahwasanya pendapatan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan atau penerimaan pajak di daerah pada masa pandemi covid-19 masih menjadi penopang utama dalam melakukan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan yang akan dijalankan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bâzgan, 2018; Kusumawati & Wiksuana, 2018) bahwa apabila pendapatan asli daerah yang salah satunya memuat pendapatan pajak mengalami peningkatan, maka bisa dipastikan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan ikut meningkat. Senada dengan penjelasan diatas, temuan penelitian yang dilakukan oleh (Habib Saragih, 2018) bahwa agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka perlu adanya sinergi dari berbagai pihak dalam memanfaatkan penerimaan pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan, karena manfaat pajak tersebut akan kembali kepada daerah yang mereka tinggali. Menyambung pernyataan diatas, penelitian (Egbunike et al., 2018) menemukan hasil bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, alokasi dan pendanaan proyek produktif perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga alokasinya tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Lesfandra, 2021) bahwa tidak terdapat pengaruh oleh pajak terhadap

pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga belum memberikan dukungan pembangunan guna pengembangan kemandirian ekonomi di berbagai sektor.

### **Pengeluaran Barang Dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi**

Mengacu pada hasil uji parsial didapatkan bawa pengeluaran barang dan jasa berpengaruh negatif & signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif bisa dijelaskan akibat pemerintah melakukan realokasi anggaran dana untuk melakukan belanja secara kontinu pada sektor kesehatan. Biaya barang dan jasa yang telah dicanangkan direvisi dalam rangka membiayai operasional penanggulangan Covid-19 seperti; pembelian masker, pembelian obat-obatan, pembelian disinfektan, serta pemberian insentif kepada tenaga medis. Tingginya kebutuhan dan pengeluaran operasional medis tersebut belum mampu diimbangi oleh pos pendapatan khususnya pajak yang oleh pemerintah menetapkan kebijakan insentif pajak. Sehingga bertambah tingginya pengeluaran tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif ini senada dengan hasil penelitian (Deswanto et al., 2017; Dudzevičiūtė et al., 2018) yang menemukan bahwa ekspansi yang dilakukan pemerintah menimbulkan alokasi pengeluaran barang & jasa ditempatkan pada pendanaan yang kurang produktif. Pada akhirnya banyak alokasi yang tidak tepat sasaran, memunculkan hasil negatif lalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian (Ahmad et al., 2019) bahwa pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan catatan pemerintah harus mampu mengarahkan alokasinya kepada belanja dan jasa sehingga bisa meningkatkan permintaan agregat. Pengeluaran barang dan jasa masuk pada kategori belanja langsung yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Belanja barang dan jasa pada umumnya dialokasikan pada pembelian barang atau jasa yang habis pakai baik yang diperjualbelikan maupun tidak. Seperti hasil penelitian (Limpele et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa Alokasi belanja barang dan jasa akan bermuara kepada optimalnya fungsi keuangan di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, petugas layanan masyarakat, serta sektor jasa yang lainnya. Sektor-

sektor tersebut merupakan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah.

### **Pengeluaran Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi**

Melalui hasil uji parsial didapatkan bahwa pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa pengeluaran modal tidak memberi pengaruh signifikan serta belum bisa terukur implikasinya dalam jangka pendek. Temuan ini dapat dijelaskan mengingat belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap serta memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realokasi anggaran dana saat pandemi juga menysasar pos belanja modal yang berisi pembangunan proyek infrastruktur. Kegiatan proyek yang terpaksa dibatalkan maupun yang masih mampu dinegosiasi untuk ditunda, selanjutnya anggarannya dialihkan untuk tujuan pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga defisit anggaran bisa ditekan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Makhoba et al., 2019) menemukan bahwa dalam jangka pendek belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Hasil penelitian (Fajri, 2016) juga menjelaskan bahwa ketidaktepatan mengalokasikan belanja modal dapat menurunkan permintaan produksi daerah, sehingga belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal pada sektor industri dapat menimbulkan terbengkalainya sektor non industri. Dengan perkembangan sektor industri yang pesat dapat berakibat dialihkannya lahan produktif karena digunakan sebagai tempat berdirinya industri. Sehingga penanaman modal tersebut memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan modal yang mampu diatur oleh pemerintah dengan baik akan berdampak pada penerimaan pajak, penurunan utang, serta penurunan defisit yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Senada dengan penjelasan diatas, penelitian yang dilakukan (Deswantoro et al., 2017; Saparman, Syapsan, 2022; Waryanto, 2017) bahwa realisasi belanja modal yang tepat dapat memicu permintaan pada barang dan jasa pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Permintaan tersebut ditanggapi dengan baik oleh pihak penyedia atau produsen dengan melakukan pengadaan asset atau infrastruktur umum. Sehingga memperlancar aktivitas ekonomi

masyarakat dan menyebabkan ekonomi mengalami pertumbuhan.

### **Pendapatan Pajak, Pengeluaran Barang & Jasa, Pengeluaran Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi**

Pada analisis uji F untuk menentukan pengaruh secara simultan, memperoleh hasil bahwa pendapatan pajak, pengeluaran barang & jasa, serta pengeluaran modal berpengaruh secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini bisa ditafsirkan bahwa kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah saat pandemi mampu memberikan pengaruh terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus berusaha menanggulangi dampak pandemi agar produktifitas tetap terjaga dibuktikan dengan melakukan rekayasa instrumen fiskal seperti; pemberian insentif pajak, realokasi anggaran dana kepada sektor kritical dan sektor esensial, serta penundaan proyek pembangunan. Pengaruh secara simultan sejalan dengan hasil penelitian (Nuru & Gereziher, 2021) kebijakan fiskal yang ditetapkan secara komprehensif baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Senada dengan penjelasan tersebut penelitian (Junfeng et al., 2022) menjelaskan bahwa gangguan eksternal adanya covid-19 telah mengganggu stabilitas ekonomi, dan dengan kebijakan fiskal tepat dilaksanakan guna mempertahankan ekonomi karena pemerintah mampu merekayasa pendapatan dan pengeluaran yang telah dicanangkan

### **KESIMPULAN**

Dalam mempertahankan perekonomian di masa pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal baik dari pos penerimaan maupun pengeluaran. Pada pos penerimaan pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak untuk mengurangi beban dan menghindari penunggakan pajak. Pada pos pengeluaran pemerintah melakukan realokasi anggaran dana yang ditujukan kepada sektor yang dinilai penting seperti; pembelian alat kesehatan, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, pendanaan kartu prakerja. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan demi terjaganya pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor tertentu, serta daya beli masyarakat sebagai tindakan nyata menanggulangi wabah Covid-19. Pendapatan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pajak di daerah pada masa pandemi covid-19 masih menjadi penopang utama dalam melakukan kontribusi

terhadap pembiayaan pembangunan yang akan dijalankan. Pengeluaran barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Realokasi anggaran dana kepada sektor kesehatan menyebabkan tingginya kebutuhan dan pengeluaran terhadap barang medis yang belum mampu diimbangi oleh pemasukan pemerintah yang berjalan lambat akibat kebijakan insentif pajak. Pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penundaan proyek pembangunan serta pengaruh pengeluaran modal yang tidak bisa diukur dalam jangka pendek mengakibatkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan pajak, pengeluaran barang & jasa, pengeluaran modal secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat ditafsirkan bahwa kebijakan fiskal menjadi alat yang tepat digunakan guna mempertahankan ekonomi di masa pandemi. Tidak semua kebijakan fiskal yang diberlakukan di masa pandemi memberikan dampak positif. Dari penelitian ini menemukan temuan bahwa belanja barang dan jasa memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini didapatkan karena pemerintah pada masa pandemi melakukan realokasi anggaran pengeluaran yang belum bisa diimbangi oleh pos pendapatan pemerintah. Sehingga tingginya pengeluaran pemerintah pada barang dan jasa tidak berpengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa pengeluaran modal tidak berpengaruh signifikan karena implikasinya yang belum bisa diukur dalam jangka pendek. Dampak pandemi tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia saja, namun seluruh dunia juga terdampak. Pemerintah telah menghadapi dampak pandemi dengan berbagai usaha seperti mengambil kebijakan dalam bidang fiskal. Realokasi anggaran dana kepada sektor kritical dan esensial menjadi jalan agar perekonomian tetap berjalan sekaligus mengurangi dampak Covid-19. Hasil kinerja kebijakan fiskal pada masa pandemi juga bisa menjadi tolok ukur kedepan apabila terdapat kondisi yang hampir sama terulang lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. D., Rantan, W. M., & Wuyah, Y. T. (2019). Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria (1986 -2018). *Journal of Advances in Social Science and Humanities*, 5(10 SE-Research Articles). <https://doi.org/10.15520/jassh59452>
- Amri, K. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 8, 1–18.
- Azimi, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2020. *Jurnal Produktivitas* 8, 8, 108–116. [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_n\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=4650](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_n_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=4650)
- Bahari, F., & SBM, N. (2019). Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.759>
- Bâzgan, R.-M. (2018). The impact of direct and indirect taxes on economic growth: An empirical analysis related to Romania. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 12(1), 114–127. <https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0012>
- Christiari, A. S. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7520>
- Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and monetary policy of economic development. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 42–52. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42>
- Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. *International Journal of Social Economics*, 45(2), 372–386. <https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2016-0365>
- Egbunike, F. C., Emudainohwo, O. B., & Gunardi, A. (2018). Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 213–220. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i2.7341>

- Evans, O., Adeniji, S. O., Nwaogwugwu, I., Kelikume, I., Dakare, O., & Oke, O. O. (2018). The relative effect of monetary and fiscal policy on economic development in Africa: a GMM approach to the St. Louis equation. *Business and Economic Quarterly*, 2, 3–23. [https://www.researchgate.net/profile/Sesan-Adeniji/publication/328124913\\_The\\_relative\\_effect\\_of\\_monetary\\_and\\_fiscal\\_policy\\_on\\_economic\\_development\\_in\\_Africa\\_a\\_GMM\\_approach\\_to\\_the\\_St\\_Louis\\_equation/links/5bc5c9e299bf17a1c62e7f6/The-relative-effect-of-mone](https://www.researchgate.net/profile/Sesan-Adeniji/publication/328124913_The_relative_effect_of_monetary_and_fiscal_policy_on_economic_development_in_Africa_a_GMM_approach_to_the_St_Louis_equation/links/5bc5c9e299bf17a1c62e7f6/The-relative-effect-of-mone)
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35. <https://online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/view/3954/8508>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Habib Saragih, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia the Effect of Tax Revenue on the Economic Growth in Indonesia. *Sikap*, 3(1), 17–27. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Hanif, I., Wallace, S., & Gago-de-Santos, P. (2020). Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968088>
- Hasanudin, Nurwulandari, A., & Safitri, R. kris. (2021). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Jufra, A. A. (2020). *Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. 9(June), 116–131.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 595–616.
- Junfeng, R., Yechi, M., Farmanesh, P., & Ullah, S. (2022). Managing transitions for sustainable economic development in post-COVID world: do fiscal and monetary support matter? *Economic Research-Ekonomika Istraživanja*, 0(0), 1–14. <https://doi.org/10.1080/1331677x.2022.2028176>
- Kouassi, K. B. (2018). Public Spending and Economic Growth in Developing Countries: a Synthesis. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 2(2), 22–30. [https://doi.org/10.21272/fmir.2\(2\).22-30.2018](https://doi.org/10.21272/fmir.2(2).22-30.2018)
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (N. Nur M (ed.)). PT. Remaja Rosdakarya.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Lesfandra, L. (2021). Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 180–188.
- Limpele, J. J., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 84–99.
- Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment to the Economic Growth of Primary Sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 1692–1703. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1101>
- Maisaroh, M., & Risyanto, H. (2018). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Provinsi Banten. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 206. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.2.1049>

- Makhoba, B. P., Kaseeram, I., & Greyling, L. (2019). Assessing the impact of fiscal policy on economic growth in South Africa. *African Journal of Business and Economic Research*, 14(1), 7–29. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2019/v14n1a1>
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). The government's fiscal policy strategy to improve the economy of Indonesia in the covid-19 pandemic period. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs/32/index.php/BILANCIA/index>
- Nugraha, Y. N. (2019). *Ketertanggung Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketertanggung-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Nuru, N. Y., & Gereziher, H. Y. (2021). The effect of fiscal policy on economic growth in South Africa: a nonlinear ARDL model analysis. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/jeas-06-2020-0088>
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Panama, H., Zuhroh, I., & Nuraini, I. (2019). Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(3), 410–420. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i3.9545>
- Phuc Canh, N. (2018). The effectiveness of fiscal policy: contributions from institutions and external debts. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 25(1), 50–66. <https://doi.org/10.1108/jabes-05-2018-0009>
- Prayitno, B., & Yustie, R. (2020). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(April), 47–53.
- Pusporini, I. D. (2020). *ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 6, 485–508.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 113. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.19262.113-120>
- Saparman, Syapsan, D. T. (2022). Pengaruh Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 70–78.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA UNTUK KEMUDAHAN EKONOMI SAAT MASA PANDEMI COVID-19. *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19*, V, 20. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Waweru, D. (2021). Government Capital Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(8), 29–36. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i830409>
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>